

## **BAB 2**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **2.1 Deskripsi Konseptual**

Dalam menyusun kerangka penelitian serta sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian agar lebih fokus dalam mengumpulkan dan mencari data serta informasi yang lebih mendalam, peneliti menggunakan teori serta konsep yang bersumber dari ahli atau pakar yang menjadi alat analisis dalam pembahasan penelitian. Penggunaan konsep dan teori ini juga berfungsi agar menjadi rujukan bagi peneliti dalam menganalisis serta menghindari terjadinya subjektivitas penelitian.

Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya konsep atau teori yang terkait dengan ilmu pertahanan, strategi, konflik, pencegahan konflik dan damai, serta sistem deteksi dini dan respon dini. Hal ini dituliskan dalam bentuk fokus dan sub-fokus yang telah peneliti tetapkan, sehingga peneliti dapat menghindari dan meminimalisir bias yang mungkin terjadi dalam suatu proses penelitian maupun dalam menganalisis hasil penelitian.

##### **2.1.1 Teori Strategi**

Secara umum, strategi memiliki makna sebagai cara. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu '*strategia*' yang memiliki makna "*the art of the general*". Artinya, strategi merupakan seni yang digunakan oleh seorang panglima dalam peperangan. Memang pada awalnya, strategi diyakini sebagai suatu seni yang hanya dipahami di dalam dunia militer.<sup>1</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman, terminologi strategi tidak hanya digunakan dalam dunia militer, namun juga digunakan dalam disiplin lain seperti manajemen, bisnis, hubungan internasional, ekonomi,

---

<sup>1</sup> Randall G. Bowdish, *Military Strategy: Theory and Concepts*, (Lincoln: University of Nebraska, 2003), hlm. 176.

dan lain-lain. Hanya saja, hingga sekarang belum ada definisi baku yang digunakan oleh semua disiplin ilmu tersebut.

Dalam sejarah perkembangannya, terdapat banyak sekali para ahli yang memformulasikan definisi strategi. Menurut Craig dan Grant, strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi dan bagaimana organisasi tersebut meangalokasikan sumber daya yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan tujuan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, Quinn berpendapat bahwa strategi merupakan pola rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Jadi, strategi yang baik yaitu apabila strategi tersebut dapat memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta memiliki kemampuan untuk mengantisipasi lingkungan.<sup>3</sup>

Sementara itu, menurut Anthony, Parrewe, dan Kachmar, strategi adalah formulasi misi serta tujuan organisasi yang di dalamnya terdapat rencana aksi untuk meraih tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan organisasi.<sup>4</sup>

Sedangkan David mengatakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut di atas, bahwa strategi merupakan cara atau rencana yang dirancang oleh para elit negara pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Arthur Lykke, seorang kepala departemen strategi di *Army War College* Amerika Serikat berhasil merumuskan sebuah formulasi bagaimana mendefinisikan teori strategi. Menurut Lykke, teori strategi

---

<sup>2</sup> Craig & Grant, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Alexmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 1996), hlm. 79.

<sup>3</sup> Robert Quinn, *Becoming a Master Manager: a Competency Framework*, (New York, John Wiley and Sons, 1990), hlm. 40.

<sup>4</sup> Anthony, W.P., Parrewe, P.L, dan Kachmar, K.M., *Strategic Human Resources Management, Second Edition*, (Orlando: Harcourt Brace and Company, 1999), hlm. 45.

<sup>5</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 27.

sangatlah sederhana dan hanya bergantung kepada tiga faktor, yaitu: *ends*, *ways*, dan *means*.<sup>6</sup> Menurut teori ini, strategi adalah bagaimana (ways) kepemimpinan menggunakan kekuasaannya demi negara. Dan sangat penting untuk memastikan keadaan dan lokasi geografis demi mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung kepentingan nasional. Sementara itu, *means* merupakan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan.

### 1. *Ends*

*Ends* atau *Objective* berkaitan erat dengan tujuan nasional yang telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan global serta memperhitungkan ancaman dan juga peluang. Melalui perumusan tujuan atau *objective*, pembuat strategi mempertimbangkan alternatif konsep dan aksi dengan menggunakan elemen kekuatan nasional. Dan untuk memaksimalkan peluang memperoleh tujuan, strategi yang dilaksanakan harus berbasis tujuan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan harus mampu memformulasikan tujuan nyata yang dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga dalam proses pencapaian tujuan tersebut, masyarakat mendukung secara penuh setiap langkah yang ditempuh oleh pembuat kebijakan atau pemerintah.

### 2. *Means*

Setelah merumuskan tujuan, para pembuat strategi mempertimbangkan sumber daya atau *resources* yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta sumber daya alam. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dapat dioptimalisasikan guna meraih tujuan. Pemerintah atau para elit pembuat keputusan juga dapat melibatkan banyak sumber daya untuk menciptakan sinergitas

---

<sup>6</sup> Arthur Lykke dalam M. Kurtis Bans, *Strategy Development for Future Security Environment*, (Journal of Military and Information Science Vol. 3 No.3, 2015), hlm 75-77.

antara satu dengan yang lainnya. Sinergitas tersebut diharapkan dapat mempermudah jalannya pencapaian tujuan yang diharapkan.

### 3. Ways

Yang ketiga adalah cara atau *Concept*. Konsep strategi berisi cara-cara yang diformulasikan oleh pembuat strategi untuk mencapai tujuan nasionalnya. Pada tahap ini, ways terbagi menjadi tiga level: *strategy policy*, *strategy operational*, dan *strategy tactical*. *Strategy policy* berisi formulasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang terkait tujuan yang ingin dicapai. *Strategy operational* merupakan serangkaian rencana (*plan*) untuk mencapai tujuan. Sementara *strategy tactical* ialah aksi/tindakan dari rencana-rencana yang mengacu pada formulasi kebijakan yang telah disusun guna mencapai tujuan.



**Gambar 2.1 Kerangka Teori Strategi**

Sumber: Arthur Lykke dalam M. Kutsi Basri , 2015.

### 2.1.2 Teori Damai

Damai menurut pengertian umum adalah kondisi tanpa perang atau kekerasan. Namun bagi Johan Galtung, definisi tersebut tidak mampu mewakili berbagai dinamika yang ada. Sehingga pada tahun 1964, Galtung membagi tipologi damai ke dalam dua bentuk yaitu damai positif dan damai negatif. Galtung mendefinisikan damai negatif sebagai kondisi tanpa adanya kekerasan langsung namun masih terdapat kekerasan struktural dan kultural. Sementara damai positif dimaknai sebagai situasi terciptanya integrasi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Terkait dengan hal tersebut, Johan Galtung juga menjelaskan tentang tipologi kekerasan yang terdiri dari: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Menurutnya, damai negatif berada pada posisi dimana tidak adanya kekerasan langsung yang terorganisir. Sementara damai positif adalah situasi absennya kekerasan struktural dan kultural serta hadirnya keadilan, harmonisasi, dan kesetaraan dalam tatanan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Galtung, kondisi damai antara dua kelompok yang tidak pernah atau jarang berinteraksi tergolong perdamaian negatif. Damai negatif adalah kondisi saat potensi transformasi konflik menjadi kekerasan fisik berhasil dikendalikan. Namun hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kondisi damai absolut, karena damai negatif masih memiliki kekerasan yang terjadi baik secara struktural maupun kultural.

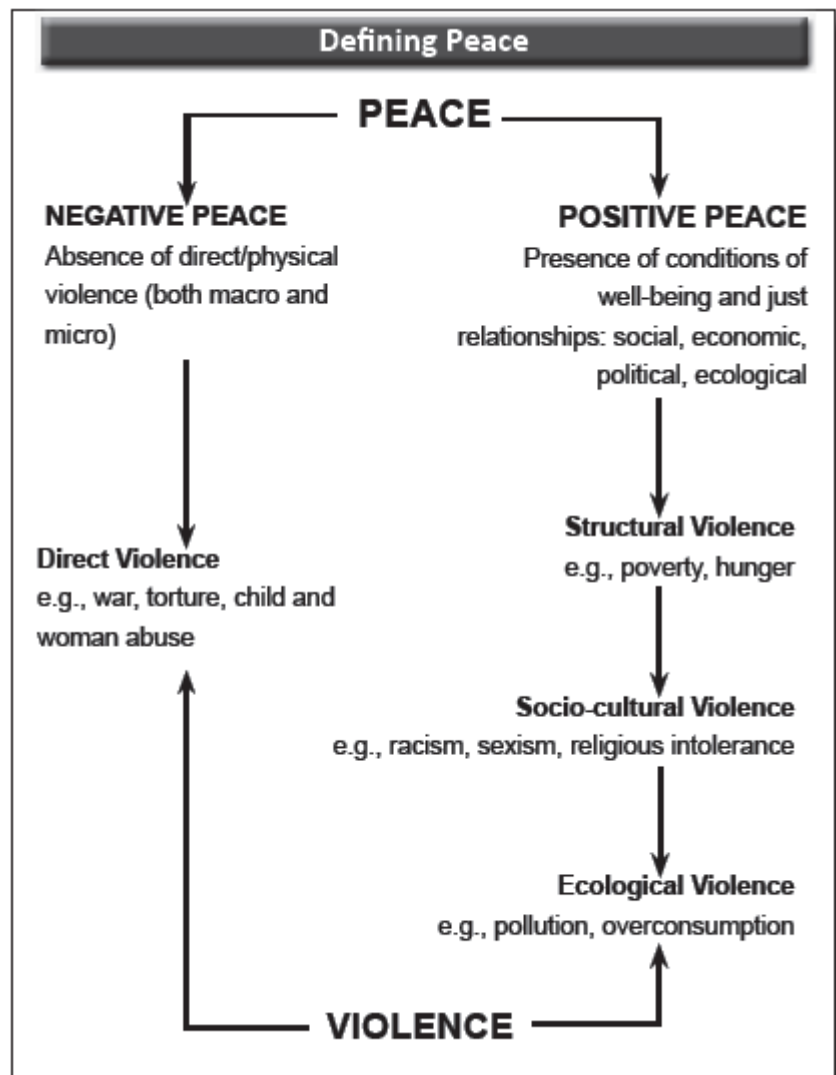
Bagi Galtung, damai yang ideal adalah hilangnya kekerasan secara total, bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan struktural dalam birokrasi dan kekerasan kultural dalam pola pikir manusia. Damai positif mengedepankan situasi ketika keadilan, kesetaraan, dan penghargaan atas hidup itu sendiri. Situasi saat manusia hidup secara

---

<sup>7</sup> Johan Galtung dalam Castro, Loreta Navarro and Jasmin Nario Galace, *Peace Education: a Pathway to a Culture of Peace*, (Philippines: Center for Peace Education, Miriam College, 2008), hlm. 17-19.

<sup>8</sup> Johan Galtung dalam Temesgen Tilahun, *Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in Contemporary Ethiopia: an Appraisal*, (International Journal of Political Science and Development, Vol. 3(6), Juni 2015), hlm. 251-258.

harmonis tanpa ada keinginan untuk menundukkan, menguasai, atau bahkan mematikan hak hidup orang lain.



**Gambar 2.2 Peace Education: a Pathway to a Culture of Peace**

Sumber: Loreta Navarro Castro and Jasmin Nario Galace, 2008.

Damai negatif atau secara sederhana diterjemahkan sebagai nir kekerasan dan perang umumnya dijumpai dalam ranah diplomasi. Diplomasi yang dilakukan ini bisa kita lihat misalnya pada daerah-daerah konflik. Masyarakat yang tinggal daerah konflik merindukan damai yang ditandai dengan berakhirnya sebuah perang atau pertikaian yang terjadi di

daerahnya. Sehingga upaya diplomasi dilakukan untuk menghentikan perang atau bentuk kekerasan langsung lain yang terjadi di daerah tersebut. Sebaliknya, damai positif dijumpai dalam *peacebuilding*. Pada *peacebuilding* terjadi sebuah proses transformasi konflik yang mengarahkan kondisi masyarakat untuk terbebas dari kekerasan struktural dan kekerasan kultural.

Dengan kata lain, pencapaian damai negatif lebih konservatif karena hanya menjaga kondisi sebagaimana semestinya sementara damai positif justru menumbuhkan hal-hal baru yang sebelumnya belum tumbuh. Maka dari itu bentuk damai positif akan terasa lebih kompleks dan berat sehingga menuntut pula sebuah upaya yang tidak mudah untuk mencapainya.

### **2.1.3 Teori Konflik**

Konflik merupakan aspek instrinsik dan tidak dapat dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.<sup>9</sup> Persamaan dan perbedaan kepentingan sosial menjadi faktor pendorong timbulnya konflik maupun integrasi. Oleh karena itu, konflik dan integrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu menghiasi kehidupan sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Perbedaan akan selalu dijumpai dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satu manusia pun yang memiliki kesamaan yang persis baik dalam segi agama, etnis, kepentingan, tujuan, kehendak, dan lain sebagainya. Jika tidak dapat mengatasi perbedaan yang ada, hal tersebut dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Dari setiap konflik

---

<sup>9</sup> Miall Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Marsudi Utoyo, *Akar Masalah Konflik Keagamaan di Indonesia*, (Jurnal Lex Librum, Vol.III No.1. Desember, 2016), hlm. 367-376.

sosial yang muncul ke permukaan, beberapa diantaranya dapat diselesaikan dengan baik. Namun ada juga konflik sosial yang sulit untuk dipecahkan hingga ke akar masalahnya sehingga menimbulkan sebuah aksi kekerasan.

De Dreu dan Gelfand menyatakan bahwa “*conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to.*” Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktik-praktik lainnya.<sup>11</sup>

Robbins menyebut konflik sebagai “*a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests*”. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi.<sup>12</sup>

Kondalkar yang mengutip pendapat Thomas menyatakan bahwa konflik sebagai “*process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something that the first party cares about .*” Proses konflik bermula ketika satu pihak mempersepsi bahwa pihak lain memiliki afeksi (perasaan) negatif.<sup>13</sup>

Kondalkar juga melanjutkan bahwa *conflict “as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others”*.<sup>14</sup> Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan

<sup>11</sup> De Dreu CKW & Gelfand MJ, *The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations*, (New York: Lawrence Erlbaum Associate, 2007), hlm. 22.

<sup>12</sup> Robbins SR, *Organizational Behaviour*, Ninth Edition, (New Delhi: Prentice Hall, 2001), hlm. 34.

<sup>13</sup> Kondalkar VG, *Organizational Behavior*, (New Delhi: New Age International Limited Publisher, 2007), hlm. 76.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

(*disagreement*) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima panangan atau tujuannya oleh individu atau kelompok lain. Dilihat dari manifestasinya, Pondy menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan konflik yang manifest. Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsi dan dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya, konflik manifest meliputi konflik yang membutuhkan negosiasi artinya dapat terjadi secara dinamik antar individu ataupun antarkelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya penyimpangan (*violence*).<sup>15</sup>

Ditinjau dari tingkat analisisnya, maka konflik dapat diklasifikasi dalam beberapa tingkatan, yaitu: tingkatan individual, tingkatan kelompok, tingkatan organisasi.<sup>16</sup> Pada tingkatan individual, konflik dapat terjadi karena predisposisi (seperti dogmatisme, persetujuan, motif kekuasaan), atau karakteristik pekerjaan (seperti ambiguitas kerja, anatomi pekerjaan), proses konfliknya meliputi konflik pada kondisi motivasi, kognisi, afeksi, dan efeknya dapat terjadi pada kesejahteraan dan kesehatan, tingkat absensi, dan pindah kerja.

Selain itu, dari berbagai definisi konflik yang telah dijabarkan oleh banyak ahli. Johan Galtung mencoba untuk mensintesis sudut pandang dari berbagai pakar tersebut dalam sebuah konsep yang dikenal dengan segitiga konflik. Menurut Galtung, semua konflik yang ada dapat dijabarkan menggunakan segitiga konflik. Konflik adalah sebuah kontradiksi baik di dalam aktor (dilema) atau diantara minimal dua aktor (perselisihan). Dalam hal ini, kontradiksi merupakan akar konflik. Galtung mendefinisikan konflik sebagai ketidaksesuaian antara tujuan dan nilai para aktor dalam sebuah sistem sosial. Dalam segitiga konflik, para aktor dibedah dari kontradiksi nilai dan tujuan yang dimilikinya lalu dibandingkan

---

<sup>15</sup> Pondy LR, *Organization conflict, concepts, and models*, (Administrative Science, 1969), hlm. 296-320.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

dengan sikapnya untuk mengejar atau mempertahankan nilainya dalam bentuk tingkah laku atau tindakan.<sup>17</sup>

Sikap seorang aktor dalam memandang sebuah kontradiksi akan mempengaruhi kemampuan aktor untuk bertindak. Jika kontradiksi membuat seseorang menjadi frustrasi, aktor akan bertindak agresif sebagai cara membela diri. Kontradiksi dan sikap adalah bagian laten yang tidak terlihat dari seseorang. Biasanya dalam konflik, bagian tingkah lakunya yang dapat terlihat dengan mudah oleh indera.

Ichsan Malik juga menggunakan kerangka analisis SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*) untuk melihat sumber utama konflik.<sup>18</sup> SAT dapat diartikan sebagai fakta obyektif yang dapat mempengaruhi dinamika eskalasi konflik. Menurut Ichsan Malik, elemen *Structural* bisa diibaratkan sebagai rumput kering, yaitu sumber utama konflik atau latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Biasanya, sumber utama konflik tersebut bersifat struktural dan laten, misalnya kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang inheren, ketidakadilan, ketiadaan institusi yang memadai dan responsif, kerusakan ekologis terhadap wilayah, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai risiko konflik yang dilihat dari potensi konflik yang terjadi selama beberapa dekade sebelumnya.

*Trigger* diibaratkan sebagai api yaitu pemicu awal konflik. Pemicu awal konflik ini biasanya merupakan insiden situasional yang menyebabkan konflik yang awalnya laten menjadi mulai muncul ke permukaan. Contoh dari faktor "T" ini biasanya perkelahian antar dua orang dari suku atau kelompok berbeda, pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, serta skandal politik. Hal-hal tersebut biasanya hanya bersifat jangka pendek namun dapat memicu emosi masyarakat sehingga mengantarkan pada terjadinya eskalasi konflik.

---

<sup>17</sup> Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (Oslo: Sage Publication, 2012), hlm 70-76.

<sup>18</sup> Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm 12.

Elemen terakhir yaitu *Accelerator* yang diibaratkan sebagai angin. *Accelerator* ini merupakan penyebab meluasnya konflik. Hal-hal yang termasuk dalam akselerator biasanya merupakan kejadian di luar parameter-parameter model. Pada umumnya, A merupakan kejadian umpan balik yang dengan cepat dapat meningkatkan level signifikansi situasi umum yang paling mengandung kekerasan. Akselerator dapat dimaknai sebagai katalisator dalam proses eskalasi konflik. Dengan demikian, akselerator dapat didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa atau kejadian yang tidak berhubungan langsung dengan indikator konflik, namun dapat memicu eskalasi maupun de-eskalasi konflik dengan sangat cepat. Berbagai contoh dari akselerator yaitu: kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap satu golongan tertentu, konflik bersenjata antar dua kelompok, peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok, serta meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap integritas hidup manusia.

Masing-masing faktor yaitu struktural, akselerator, dan trigger memiliki karakteristik yang spesifik. Struktural (S) merupakan faktor yang memiliki sifat jangka panjang dan merupakan indikator ordinal (dapat diukur naik turunnya). Sedangkan trigger (T) memiliki sifat jangka pendek dan sporadis. Sementara akselerator (A) bersifat situasional yang memiliki hubungan empirik dan atau logis dengan naik-turunnya indikator S dan T.

Kerangka SAT ini harus diimplementasikan dengan begitu teliti dan terstruktur. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan SAT yaitu harus memperhatikan rangkaian peristiwa konflik-konflik sebagai sesuatu yang mengalir dan kronologis. Analisis SAT tidak boleh dilakukan terputus-putus atau menghilangkan rangkaian sejarah peristiwa konflik pada masa lalu. Karena apabila hal tersebut dilakukan, tidak akan ada titik temu yang menghubungkan faktor-faktor konflik dan konflik akan menjadi sesuatu yang sulit dipecahkan.

Hal penting yang juga harus diperhatikan berkaitan dengan SAT adalah bagaimana analisis SAT tersebut dapat menghasilkan efek yang

berbeda di setiap daerah. Seperti yang telah diketahui bahwa SAT merupakan fakta obyektif yang dianggap sebagai komponen penting dalam proses eskalasi dan de-eskalasi. Namun, terkadang terdapat perbedaan antara konsep yang ada dengan realitas di lapangan. Seringkali ditemukan fakta bahwa adanya *trigger* yang serupa dalam konteks struktural yang sama pada waktu tertentu tidak menghasilkan eskalasi konflik kekerasan. Sebaliknya, *trigger* yang serupa dalam konteks struktural yang sama pada waktu yang berbeda bisa mendorong eskalasi konflik kekerasan yang luar biasa. Hal tersebut dapat dijelaskan menggunakan analisis sekuritisasi.

Hubungan antara faktor SAT dan kekerasan konflik bukan merupakan faktor otomatis yang dapat bereaksi. Diperlukan adanya internalisasi oleh para aktor untuk mengubah SAT menjadi sebuah konflik kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan terjadi karena adanya para aktor yang melihat bahwa SAT (atau indikator-indikator lain) merupakan sebuah ancaman yang nyata. Selanjutnya suatu insiden yang menjadi indikator SAT direspon secara abnormal melalui sebuah kekerasan yang disetujui oleh masyarakat. Tindakan tersebutlah yang dinamakan sekuritisasi.

Sekuritisasi memiliki beberapa konsep yang menjabarkan bagaimana sekuritisasi tersebut dijalankan. Adapun konsep-konsep tersebut ialah aktor sekuritisasi, *functional actor*, logika ancaman, *referent object*, dan ancaman keamanan eksistensial.<sup>19</sup>

Pertama, aktor sekuritisasi merupakan pelaku yang mengusahakan sekuritisasi. Dalam hal ini, aktor sekuritisasi tersebut menyebarkan ide, gagasan maupun pandangan mereka. Aktor sekuritisasi inilah yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk merespon secara abnormal sebuah ancaman keamanan eksistensial. Penyebaran ide tersebut berisi tentang isu-isu ancaman potensial yang dipandang dapat merusak stabilitas suatu negara, isu-isu tersebut dikenal dengan ancaman keamanan eksistensial.

---

<sup>19</sup> Barry Buzan, Ole Waever & Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*, (London: Lynne Rienner Publisher, 1998), hlm. 35-42.

*Referent Object* (RO) ialah kelompok orang yang dianggap oleh aktor sekuritisasi sebagai aktor rentan terhadap ancaman keamanan eksistensial (biasanya masyarakat yang mudah dipengaruhi). Kemudian, *Functional Actor* adalah pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan antara aktor sekuritisasi dan RO, contohnya media massa. Sementara *Logic of threat* merupakan komponen yang mengandung substansi *speech act* dari aktor sekuritisasi mengenai ancaman eksistensial yang sedang mengancam RO. Dengan mengimplementasikan kerangka SAT ini secara tepat, diharapkan sebuah konflik dapat dipetakan dengan mudah sehingga resolusi konflik dapat diformulasikan dengan tepat.<sup>20</sup>

#### 2.1.4 Konsep Pencegahan Konflik

Berkaitan dengan penanganan konflik, Fisher menjelaskan beberapa metode yang bisa diaplikasikan guna menangani konflik. Di antaranya yaitu: pencegahan konflik (*conflict prevention*), penanganan konflik (*conflict settlement*), manajemen konflik (*conflict management*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan transformasi konflik (*conflict transformation*).<sup>21</sup>

Metode-metode tersebut memiliki tingkatan tersendiri dalam penanganan konflik. Tahap pencegahan konflik merupakan upaya awal yang bersifat preventif yaitu untuk mencegah timbulnya konflik kekerasan. Tahap kedua yaitu penanganan konflik yaitu upaya yang dilakukan dengan meredam konflik kekerasan dan mencapai kesepakatan damai. Tahap ketiga adalah manajemen konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari timbulnya kekerasan yang mungkin akan muncul dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan dalam perubahan pola tingkah laku pihak-pihak yang terlibat ke arah yang positif. Tahap selanjutnya yaitu resolusi konflik yang berisi upaya untuk menciptakan relasi yang baru dan

<sup>20</sup> Ichsan Malik, *Op.cit.*, hlm 12-13.

<sup>21</sup> Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 48-49.

harmonis antar pihak yang berkonflik dengan mengatasi konflik hingga ke akar rumput. Metode tertinggi dalam penanganan konflik adalah transformasi konflik. Pada tahap ini, terdapat upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah konflik laten menjadi kondisi damai yang stabil dalam tatanan masyarakat.<sup>22</sup>

Secara etimologi, konflik dimaknai sebagai hubungan yang tidak harmoni antar individu. Sementara pencegahan dapat dipahami sebagai suatu proses awal dari serangkaian upaya pengelolaan konflik. Jadi, secara umum makna dari pencegahan konflik yaitu salah satu pendekatan konflik yang berupaya mencegah konflik kekerasan.

Pencegahan konflik merupakan salah satu metode penanganan konflik yang bersifat preventif dan berupaya mencegah timbulnya konflik kekerasan di permukaan. Menurut Fisher, pencegahan konflik merupakan strategi penanganan konflik ketika konflik masih bersifat laten dengan harapan agar konflik tersebut tidak meningkat menjadi kekerasan.<sup>23</sup> Bercovitch juga memberikan definisi pencegahan konflik yang dimaknai sebagai saranan mengakhiri yaitu bagaimana mengidentifikasi situasi yang mungkin menjadi bahaya, kekerasan, dan sangat merusak, dan bagaimana untuk menghentikan mereka menjadi demikian.<sup>24</sup>

Zartman juga memberikan pandangannya mengenai pencegahan konflik. Menurutnya, pencegahan konflik merupakan salah satu strategi untuk mencegah wabah baru terhadap konflik yang berlarut-larut di alam.<sup>25</sup> Sementara itu, Nicolas dan Mikael berpendapat bahwa terdapat dua model dalam pencegahan konflik. Model pertama adalah pencegahan konflik secara langsung (*direct prevention*), yaitu bentuk pencegahan konflik yang hanya mengatasi potensi konflik dalam waktu relatif singkat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>23</sup> Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), hlm. 59.

<sup>24</sup> Jacon Bercovith, Richard Jackson, *Conflict Resolution in the Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches*, (USA: University of Michigan Press), hlm. 89.

<sup>25</sup> William Zartman, *Governance As Conflict Management: Politics And Violence in West Africa*, (Washington DC: Brookings Institutions Press, 1996), hlm. 81.

Pada tahap ini, pencegahan konflik hanya dilakukan di bagian atas konflik saja. Model kedua yaitu pencegahan konflik secara struktural (*structural prevention*). Pada tahap ini, pencegahan konflik dilakukan secara mendalam guna menciptakan kondisi damai yang lebih tahan lama. Menciptakan kondisi sosial, politik, ekonomi yang stabil dalam masyarakat merupakan bentuk dari pencegahan konflik secara struktural.<sup>26</sup>

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan konflik sosial.<sup>27</sup> Adapun diantaranya yaitu:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat
2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
3. Meredam potensi konflik
4. Mengembangkan sistem peringatan dini

Sejauh ini, strategi pencegahan konflik menjadi mekanisme paling menguntungkan baik dalam segi ekonomi maupun politik bagi setiap pihak untuk menghadapi potensi konflik. Karena sumber daya yang dikeluarkan untuk mencegah konflik jauh lebih sedikit daripada menata kembali tatanan masyarakat yang telah hancur karena konflik kekerasan.

### **2.1.5 Konsep *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS)**

*Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS) merupakan sebuah metode atau sistem yang digunakan dalam rangka pencegahan konflik. Pada tingkat global, CEWERS mulai berkembang sejak konflik Rwanda pecah pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan

---

<sup>26</sup> Nicolas L.P Swantrom dan Mikael Weissmann, *Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management, and Beyond a Conceptual Exploration*, (Sweden: Upsupsala, 2005), hlm. 19.

<sup>27</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan Konflik Sosial.

tragedi genosida.<sup>28</sup> Namun, implementasi CEWERS pada konflik Rwanda mengalami kendala pada tahap *Early Response*. Ketika konflik Rwanda mulai mengalami eskalasi, beberapa organisasi kemanusiaan sebenarnya telah membuat laporan kepada para pihak berwenang yang dianggap mampu menghentikan konflik termasuk PBB. Namun pada kenyataannya, tidak ada respon yang tanggap dari pihak manapun sehingga pada akhirnya genosida terjadi dan menelan banyak korban jiwa.

CEWERS sebetulnya sudah lama berkembang di dunia internasional. *Forum on Early Warning and Early Response* (FEWER) adalah salah satu sistem CEWER yang berbasis di Inggris. FEWER merupakan sistem yang paling awal dibangun yaitu pada tahun 1997 dan menjadi pemrakarsa terbentuknya sistem CEWER di negara-negara lain.<sup>29</sup> Sri Lanka membentuk *Foundation for Co-Existence* (FCE), Rusia memiliki FEWER Eurasia, *Columbia University's Center for International Conflict Resolutions* (CICR) dibentuk di Timor Leste, Kenya memiliki *Uwiano Peacebuilding Platform*, dan masih banyak lagi.

Indonesia sendiri memiliki sistem CEWERS yang berbasis komunitas. Menurut program UNDP's '*Peace Through Development*' di Indonesia, sistem pencegahan konflik berbasis komunitas sangat berfungsi dengan efektif di Indonesia. Di beberapa wilayah, seperti Poso, Forum Wanita juga memiliki peran aktif dalam sistem *Early Warning*. Pencegahan konflik yang berfokus pada komunitas memberikan ruang bagi *local ways* dan *local wisdom* dalam mencegah dan mengatasi konflik kekerasan. Salah satu organisasi yang dibentuk di Indonesia dalam rangka pencegahan konflik adalah Institut Titian Perdamaian (ITP) yang berbasis di Jakarta. ITP ini memerankan peran penting dalam konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Masohi, Ternate, dan Jailolo. ITP mempromosikan

---

<sup>28</sup> Suifan dalam Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 27.

<sup>29</sup> Anna Matveev, *Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas*, (Amsterdam: European Centre for Conflict Prevention, 2006), hlm. 5.

pembangunan sinergitas antara *Early Warning* dan program *Peacebuilding*.<sup>30</sup>

*Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)* atau sistem peringatan dini dan tanggap dini konflik merupakan salah satu aktivitas penting yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah maupun instansi/lembaga guna pencegahan konflik. Hal tersebut telah diterima secara luas oleh para akademisi studi konflik modern. Karena mereka sering menganalogikan konflik sebagai suatu siklus yang terdiri dari pencegahan konflik, intervensi untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, negosiasi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, serta upaya untuk melanggengkan perdamaian sehingga kondisi damai dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan konflik tidak terulang kembali.

Pada masa awal perkembangan sistem ini, CEWERS hanya terbatas pada upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi munculnya konflik dan sekaligus pencegahannya. Dengan kata lain, sistem ini pertama kali beroperasi hanya terpusat pada *Early Warning System (EWS)* atau sistem peringatan dini saja. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terdapat kebutuhan pragmatis untuk menerjemahkan EWS menjadi sebuah kegiatan reset yang berorientasi tanggapan. Yaitu dengan memasukkan komponen aksi atau tindakan untuk mencegah konflik. Hal tersebutlah kemudian memicu perubahan yang awalnya hanya sebatas EWS menjadi CEWERS.

*Early Warning (EW)* terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku kebijakan yang dituju. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam proses *Early Warning* dan *Early Response* seperti telepon genggam, media sosial, *blogging*, *crowdsourcing* dan pemetaan konflik. Sistem peringatan dini (*Early Warning*) harus dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

hak-hak gender dan minoritas, dimana kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya tensi dan munculnya konflik.<sup>31</sup> Tantangan terbesar dalam sistem *Early Warning* yaitu sulitnya menjauhkan *Early Warning* dari pengaruh politik. Terdapat kemungkinan bahwa sistem *Early Warning* tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemantauan yang tegas dalam menjalankan sistem ini agar *output* dari sistem *Early Warning* bersifat netral.

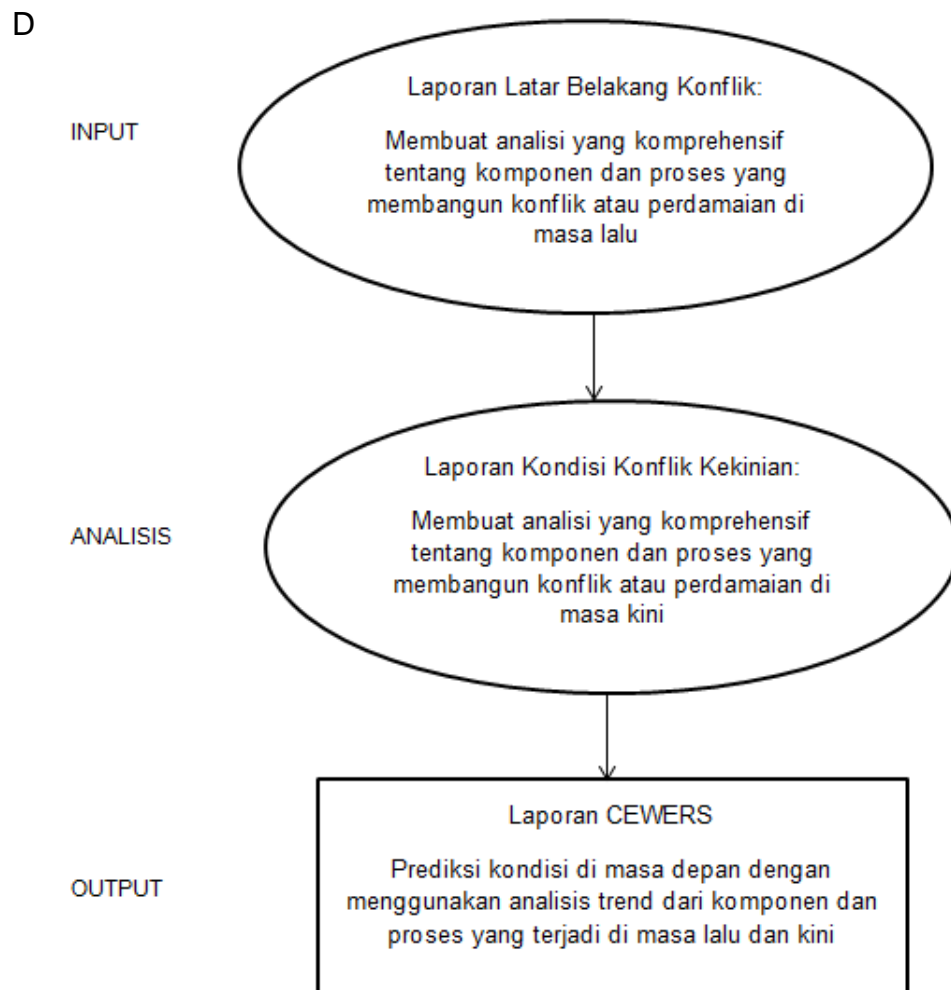
*Early Response* (ER) merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat. Biasanya Sistem *Early Response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan berada pada masa tidak aktif.<sup>32</sup> Bentuk dari *Early Response* dapat berupa mekanisme pencegahan secara langsung, dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik serta pencegahan konflik melalui diplomasi.

Konsep CEWERS merupakan sebuah sistem yang dibuat dengan memperhatikan kronologis peristiwa yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan kemungkinan peristiwa yang akan datang. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada ketiga dimensi waktu tersebut terikat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kejadian yang terjadi di masa lalu dan kondisi yang ada pada masa kini bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga dalam analisi pencegahan konflik di masa depan. Sehingga apabila kita mampu mengenali komponen dan proses utama yang membangun konflik atau perdamaian pada masa lalu dan masa kini, maka kita akan bisa memprediksi resiko konflik yang bakal terjadi pada masa mendatang.

---

<sup>31</sup> Brigitte Rohwerder, *Conflict Early Warning and Early Response*. (The GSDRC Research Helpdesk, 2015), hlm. 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



**Gambar 2. 3 Kerangka Dasar Proses Kegiatan CEWERS**

Sumber: Institut Titian Perdamaian, 2005.

Analisis CEWERS mengandung tiga kegiatan utama yang harus dilakukan. Adapun kegiatannya yaitu: analisis latar belakang konflik yang berbentuk laporan latar belakang konflik. Kegiatan pertama ini berguna untuk menganalisis histori konflik atau perdamaian yang terjadi pada masa lalu. Kegiatan yang kedua yaitu membuat analisis konflik kekinian yang berisi laporan kondisi konflik atau perdamaian terkini suatu daerah. Dan kegiatan yang terakhir yaitu mengkombinasikan analisis laporan masa lalu dan masa terkini untuk memprediksi tren konflik atau perdamaian yang

mendatang dalam bentuk laporan CEWERS. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut

### **2.1.6 Konsep Pertahanan Negara**

Peneliti ingin membangun solusi yang berbasis pada strategi pertahanan negara dalam penelitian ini. Strategi pertahanan negara merupakan cara yang dipilih menjadi *ways* atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pertahanan negara juga dikupas dan dijadikan panduan peneliti dalam mengkonstruksi strategi.

Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>33</sup>

Tujuan nasional tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

---

<sup>33</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kemhan, 2015), hlm. 35.

martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional.

Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri. Sementara arti kemerdekaan dalam hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain dan kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri, sedangkan keadilan sosial diwujudkan untuk kemaslahatan dan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>34</sup>

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sebagai berikut:

1. UN DESA Discussion Paper berjudul "*Governance Strategies for Post Conflict Reconstruction, Sustainable Peace and Development*" oleh Anita Ernstorfer, dkk. Pada tahun 2017.

Salah satu penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebuah *paper* yang ditulis oleh Anita Ernstorfer dkk pada tahun 2017. Penelitian tersebut berjudul *Governance Strategies for Post Conflict Reconstruction, Sustainable Peace and Development*. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Tulisan ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam tata kelola pemerintahan serta memberikan saran mengenai strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah atau pembuat keputusan dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

mengadopsi sebuah sistem tata kelola yang tepat sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Di dalam penelitian ini, peneliti menyarankan berbagai strategi umum yang mungkin dapat diterapkan oleh setiap negara yang mengalami konflik.

Selain itu, penelitian ini juga menguraikan berbagai dimensi kritis yang mempengaruhi efektivitas strategi rekonstruksi pascakonflik. Peneliti juga menekankan pentingnya melakukan analisis situasi untuk memahami setiap konteks secara menyeluruh dan mengidentifikasi pilar kunci dalam strategi tersebut.

Hal tersebut menunjukkan lebih lanjut kebutuhan mereka untuk peka dan berorientasi pada pembangunan dengan mempertimbangkan kebijakan publik yang efektif serta lembaga negara pemerintahan yang tepat dalam memediasi hubungan antar aktor.

2. Penelitian oleh Abosede Abimbola Usoro, dkk (2014) berjudul "*Conflict Management: The Nigerian Government's strategies and the Question of Enduring Peace*"

Penelitian lain yang cukup relevan ditulis oleh Abosede Abimbola Usoro yang berasal dari Universitas Calabar, Nigeria. Abosede bersama tim menulis sebuah jurnal yang berjudul *Conflict Management: The Nigerian Government's strategies and the Question of Enduring Peace* yang diterbitkan dalam jurnal *Bussiness and Management Research*, Vol. 3, No.2 tahun 2014.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui situasi konflik sebenarnya yang terjadi di Odi dan Krisis Delta Nigeria. Studi literatur tersebut berguna untuk mengidentifikasi strategi terbaik yang dapat digunakan oleh Nigeria. Menurut peneliti, untuk memformulasikan strategi yang tepat guna mengatasi konflik, pemerintah harus dapat menemukan akar penyebab konflik. Selain itu, para pembuat kebijakan juga tidak boleh terburu-buru dalam menggunakan kekuatan untuk mengelola konflik. Harus ada

komunikasi antar pihak-pihak yang bertikai guna mencegah kembali munculnya konflik.

3. Penelitian oleh Hendra Lumi (2015), berjudul: *Peranan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok*

Penelitian terdahulu lain yang relevan yaitu tesis yang ditulis oleh Hendra Lumi pada tahun 2015 dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data.<sup>35</sup>

Penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi perkelahian antar kelompok yang merupakan bagian dari konflik SARA. Selanjutnya, penelitian ini meneliti bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado bersama Pemerintah Kelurahan Teling belum dapat menemukan solusi yang tepat dalam menangani perkelahian antar kelompok.

4. Penelitian oleh Joko Tri Haryanto (2014), berjudul: *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim*

Penelitian ini ditulis oleh Joko Tri Haryanto dalam jurnal “Analisa” Volume 21 Tanggal 2 Desember 2014. Tulisan ini menitikberatkan pada pentingnya kerukunan umat beragama dalam rangka mewujudkan pembangunan. Fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah adanya tradisi atau kearifan lokal yang dilestarikan di komunitas tengger desa

---

<sup>35</sup> Hendra Lumi, *Peranan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok: Suatu Study di kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado*, (Jurnal Tesis, 2015), hlm. 1-11.

Ngadas yang berguna untuk memelihara keharmonisan dan kerukunan umat beragama.<sup>36</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami nilai-nilai hidup dari subjek penelitian. Sehingga, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Peneliti juga melakukan observasi, wawancara, dan data dokumentasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Peneliti menyusun sebuah tabel penelitian untuk mempermudah melihat perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Tabel tersebut berisi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### 2.4 Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

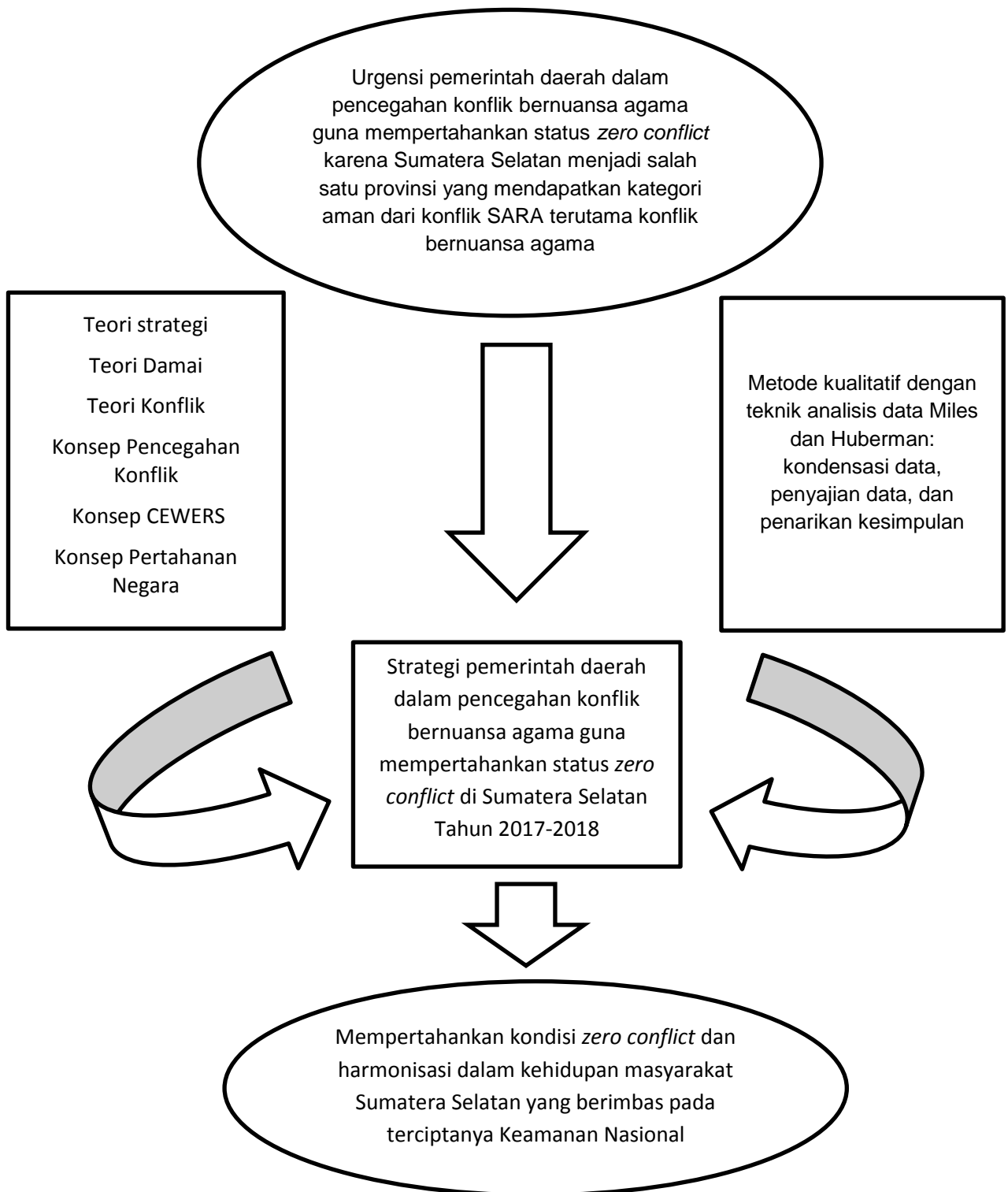
No	Judul	Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	<i>"Governance Strategies for Post Conflict Reconstruction, Sustainable Peace and Development"</i> (Paper)	Anita Ernstorfer, dkk (2017)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori strategi.	Penelitian oleh Anita, lebih kepada strategi pembangunan perdamaian pasca konflik, sementara penelitian yang peneliti tulis merupakan strategi yang dilaksanakan pemerintah untuk mencegah konflik.
2	<i>"Conflict</i>	Abosede	Baik Penelitian	Penelitian oleh

<sup>36</sup> Joko Tri Haryanto, *Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim*, (Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 2 Desember, 2014), Hlm. 201-213.

	<i>Management: The Nigerian Government's strategies and the Question of Enduring Peace"</i> (Jurnal)	Abimbola Usoro, dkk (2014)	oleh Abosede maupun penelitian ini, sama-sama menggunakan studi literatur dalam pengumpulan data.	Abosede, lebih kepada strategi pembangunan perdamaian pasca konflik, sementara penelitian yang peneliti tulis dilaksanakan sebelum konflik. Selain itu, subyek penelitian Abosede adalah pemerintah negara. Sementara subyek penelitian ini adalah pemerintah provinsi
3	<i>Peran Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok</i> (Tesis)	Hendra Lumi (2015)	Menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga sama-sama membahas tentang konflik	Fokus utama penelitian Hendra adalah peran pemerintah. Sementara penelitian yang akan diteliti berfokus pada strategi pemerintah.

			SARA	
4	<i>“Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim” (Jurnal)</i>	Joko Tri Haryanto (2014)	Penelitian yang dilakukan Joko Tri Haryanto dan penelitian ini, keduanya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan data dokumentasi untuk mengumpulkan data.	Penelitian oleh Haryanto, lebih menitikberatkan pada fungsi dari keberadaan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama. Sementara peneliti lebih mendalami peran pemerintah dalam menciptakan harmonisasi.

## 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti, 2018.